



BAPERKI sebagai Politik Identitas dan Representasi Masyarakat Tionghoa di Indonesia

BAPERKI as Political Identity and Representation of Chinese Community In Indonesia

Ahmad Bakhtiar¹, Nurbaity², Yusuf Budi Prasetya Santosa³ ✉

^{1 2 3} ✉ Universitas Indraprasta PGRI

E-mail: ahmad_bakhtiar88@yahoo.com, nurbaity_muthalib@yahoo.com, prasetyabudi29@gmail.com ✉

Diterima: 25 Februari 2022

| Direvisi: 30 Maret 2022

| Diterbitkan: 31 Maret 2022

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

BAPERKI,
Chinese Society,
Identity Politics.

The history of the Chinese diaspora to Indonesia is very interesting to discuss. The long process of the arrival of the Chinese community to Indonesia long before the arrival of westerners to Indonesia has formed a separate identity for the Chinese community who in the end had to accept the policy of 'assimilation'. This process is part of the representation of the Chinese community in Indonesia. The Chinese themselves feel that they are different from the natives in all respects, so the feeling of being a minority group is getting stronger. The Chinese increasingly showed their cultural identity after the construction of various facilities such as a special school for the Chinese, a Chinese cultural group, and a Chinese-language newspaper. In order to accommodate these interests and due to the pressure and atmosphere at that time, in 1954 the Indonesian Citizenship Consultative Body (BAPERKI) was formed. This study uses the historical method to explain the role of BAPERKI as a political identity and representation of the Chinese community in Indonesia. The stages that are passed are the heuristic stage (data collection), the critical stage, the interpretation stage and the historiography (historical writing). The increasing role of the Chinese community in Indonesia has caused them to form organizations that can protect their people, who indeed have a minority number. For that purpose, they formed BAPERKI. BAPERKI has a role as a socio-political organization of the Peranakan Chinese group in Indonesia. The issue of citizenship is the background behind the establishment of BAPERKI.

Kata Kunci:

BAPERKI,
Masyarakat Tionghoa,
Politik Identitas.

Masyarakat Tionghoa telah lama berada di Indonesia, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Barat. Memasuki masa kemerdekaan bangsa Indonesia masyarakat Tionghoa merasa memiliki karakter, budaya dan gaya hidup yang berbeda dengan masyarakat pribumi di Indonesia. Mengacu pada perbedaan tersebut, kemudian didirikanlah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) pada 1954 dalam rangka menggalang persatuan masyarakat Tionghoa, agar kedepannya masyarakat Tionghoa tidak merasa berada dalam kondisi minoritas yang tersudutkan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Dari titik inilah kemudian identitas etnis beranjak Tionghoa menguat, apalagi setelah dibangunnya berbagai sarana khusus orang Tionghoa seperti sekolah, surat kabar berbahasa mandarin dan kelompok kebudayaan Tionghoa. Tujuan penelitian ini adalah mengulas peran BAPERKI terhadap eksistensi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan tentang peran BAPERKI sebagai politik identitas dan representasi masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Tahapan yang dilakukan terdiri dari heuristik yakni mengumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan BAPERKI dan masyarakat Tionghoa. Kemudian dilanjutkan dengan kritik sumber. Tahap ini bertujuan untuk memiliki data mana yang dianggap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi terhadap data-data yang telah dipilih tersebut. Terakhir yakni historiografi atau penulisan sejarah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu, latar belakang terbentuknya BAPERKI, kondisi masyarakat Indonesia setelah terbentuknya BAPERKI, dan kontribusi BAPERKI terhadap eksistensi masyarakat Tionghoa.

PENDAHULUAN

Sebelum kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, etnis Tionghoa telah lebih dahulu menginjakkan kaki di kepulauan Nusantara melalui jalur perdagangan. Dikarenakan pada masa itu, teknologi navigasi kapal masih memanfaatkan perubahan angin musim yang datang dalam jangka waktu berbulan-bulan, maka banyak diantara pedagang tersebut yang memutuskan untuk menetap dan bahkan ada yang menikahi pribumi. Bahkan berita yang dibawa oleh Marco Polo pada pertengahan abad 13 turut memperkuat adanya pedagang Cina yang membua perkampungan muslim di Nusantara.

Pada awal abad 18, saat Surabaya masih termasuk dalam bagian kerajaan Mataram, orang Tionghoa menjual hasil bumi mereka seperti beras dengan harga yang relatif murah di pasar sekitar keraton dan benteng kompeni. Selain berdagang, di sekitar wilayah ini, mereka juga turut membangun perkampungan (Noordjanah, 2010).

Pada masa VOC, tahun 1680, para pedagang Tionghoa memegang peranan penting dalam perekonomian di Batavia. Bahkan usaha VOC untuk memonopoli pun terlambat dan mereka terpaksa berbisnis dengan para pedagang Tionghoa. Akibatnya, VOC merasa terancam karena keberadaan orang Tionghoa

secara tidak langsung menyokong kehidupan pribumi di Indonesia. Jika orang Tionghoa dan pribumi bersatu untuk melawan, maka VOC akan kewalahan. Karena itulah, VOC berusaha mengadu domba pribumi dan orang Tionghoa yang pada akhirnya mereka berhasil.

Pada tahun 1740, karena krisis ekonomi yang disebabkan oleh turunnya harga gula di pasar global, VOC hendak mengikis upah gaji para pekerja dengan cara memindahkan para kuli, yang sebagian besar adalah pribumi ke Afrika. Padahal maksud sebenarnya adalah mereka bermaksud membuang para kuli itu ke laut lepas diam-diam, isu tersebut tersebar dan para pedagang Tionghoa di Batavia, menggalang kekuatan untuk menyerbu kapal-kapal VOC tersebut. Pertumpahan darah pun tidak dapat dielakkan.

Efek serangan tersebut membuat VOC mengeluarkan perintah untuk memeriksa dan melucuti para pedagang Tionghoa, namun dalam praktiknya justru lahir pembantaian secara masal selama tiga hari, yang menelan korban jiwa dengan kisaran 50.000-60.000 rakyat Tionghoa. Demi mengalihkan berita tersebut dan memperkuat kedudukannya di Nusantara, pemerintah Belanda mengeluarkan dekrit yang menyatakan siasat rakyat Tionghoa dalam rangka memperkuat kedudukannya di Nusantara yakni dengan cara bertindak bagai

pahlawan yang mendukung kaum pribumi padahal mereka berenca membantai para kuli yang ada. Memasuki masa perjuangan mewujudkan kemerdekaan, masyarakat Tionghoa juga turut memberikan sumbangsih. Hal ini dapat terlihat dengan adanya enam anggota BPUPKI yang berasal dari golongan Tionghoa dalam rangka menyusun pembentukan UUD 1945. Namun dalam konflik senjata tidak begitu banyak etnis Tionghoa yang terlibat secara langsung, karena jumlah mereka yang minim (Suryadinata & Subono, 2005).

Di masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Etnis Tionghoa sering dijadikan sasaran kebencian oleh rakyat pribumi karena dianggap bekerja sama dengan Belanda dan mereka adalah bagian dari asing. Di sisi lain, etnis Tionghoa ini juga turut mengalami masalah berupa status kewarganegaraan. Karena mereka adalah imigran sehingga secara kelahiran mereka adalah orang Cina namun disisi lain keturunan mereka yang lahir di Indonesia sering terikat dalam dwikewarganegaraan. Faktor ini tidak terlepas dari perbedaan hukum yang berlaku di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Republik Indonesia (RI). Menurut undang-undang kewarganegaraan Tionghoa dari tahun 1929 maka setiap orang yang dilahirkan dari orang tua Tionghoa, di mana pun mereka berada dan berapa lama pun mereka sudah melawat ke luar Cina, tetap diakui sebagai rakyat Cina. Sehingga membuat banyak kalangan pemerintah juga yang memandang sebelah mata etnis Tionghoa di Indonesia

Diskriminasi ini kemudian terus berlanjut dan menyebar ke bidang ekonomi. Sekitar tahun 1950, diterpakanlah politik Benteng dengan

tujuan memajukan rakyat pribumi dengan cara membina kelas pengusaha atau bisnis. Tidak hanya sebatas pembinaan kepada pribumi semata, kebijakan politi ini membangun aturan bahwa etnis Tionghoa dilarang melakukan perdagangan dan transaksi di pedalaman. Akibatnya masyarakat Tionghoa yang mendiami pedesaan melakukan migrasi ke kota dan bergabung dengan etnis Tionghoa lainnya.

Merasa di diskriminasi, sebagian besar etnis Tionghoa kemudian sadar bahwasanya mereka adalah minoritas dan akan sulit berkembang jika tidak melakukan perubahan. Mengacu pada rasa kesamaan tersebut akhirnya etnis Tionghoa semakin bersatu. Apalagi setelah dibangunnya sarana seperti sekolah khusus orang Tionghoa, kelompok kebudayaan Tionghoa, dan surat kabar berbahasa Tionghoa. Identitas rakyat Tionghoa mulai meningkat dan puncaknya pada tahun 1954 dibentuklah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI).

Terbentuknya BAPERKI bukan berarti perselisihan antara pribumi dan etnis Tionghoa mereda. Menginjak tahun 1955-1965, dimana diterapkan kebijakan pelarangan masuknya etnis Tionghoa dalam perpolitikan bangsa Indonesia, membuat mereka lebih fokus berdagang dan mengakibatkan industri perdagangan mereka berkembang pesat. Pemerintah yang melihat perkembangan pesat dalam jangka waktu singkat berspekulasi bahwa rakyat Tionghoa menerima suap dari Belanda. Akibatnya pabrik yang dioperasikan etnis Tionghoa ditutup paksa dan mereka yang mencapai jumlah ratusan ribu dipindah paksa ke Kalimantan dan Palembang (Darini, 2011).

Pada masa Soekarno, pemerintahan Indonesia yang dibentuk setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1950 pada dasarnya mewarisi kebijakan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah membiarkan warga Tionghoa terus aktif dibidang ekonomi sambil membatasi keberadaan mereka sebagai pejabat dibidang birokrat. Namun, warga Tionghoa dibolehkan dalam bidang politik sehingga terdapat sebagian warga Tionghoa yang menduduki jabatan sebagai menteri, misalnya seperti Lie Kiat Teng sebagai menteri kesehatan dan Oey Tjoe Tat sebagai menteri pada kabinet 100 menteri. Pemerintahan Soekarno juga membolehkan etnis Tionghoa mengekspresikan kebudayaan mereka dan menjalankan agama atau keyakinan mereka (Suhandinata, 2009).

Maka dari itu jika ditelisik lebih dalam hadirnya BAPERKI bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia yang keturunan Tionghoa. Dengan tujuan yakni menjadikan setiap warga negara menjadi warga negara Indonesia yang sejati dan menentang diskriminasi rasial. Oleh sebab itu demi mengetahui lebih jauh tentang sejarah dan latarbelakang terbentuknya BAPERKI secara mendalam dan pengaruhnya terhadap eksistensi masyarakat Tionghoa di Indonesia penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengulas tentang BAPERKI dari sudut pandang historis serta kontribusinya terhadap eksistensi masyarakat Tionghoa di masa sekarang. Hal ini pula yang lantas membedakannya dengan penelitian terdahulu milik Atika Ayuningtyas, Tri Wahyuning M. Irsyam dan M. Wasith Albar

dengan judul “BAPERKI (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) organisasi sosial politik Cina peranakan di Indonesia tahun 1954-1966”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tujuan untuk mengkaji peran BAPERKI sebagai politik identitas dan representasi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Mengacu pada metode yang digunakan maka tahapan penelitian ini terdiri dari: *pertama*, heuristik yakni proses pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder yang terdiri dari literatur-literatur berupa arsip, buku, jurnal atau koran serta dokumentasi. *Kedua*, yakni kritik. Tahap ini menekankan pada kritik baik eksternal maupun internal terhadap sumber yang ditemukan demi memastikan validitas data yang didapatkan agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. *Ketiga*, terdapat interpretasi. Tahapan ini lebih menekankan bagaimana peneliti mengolah dan menafsirkan berbagai data yang didapatkan tadi sehingga dapat terhubung tertata secara kronologis dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Terakhir yakni historiograf, merupakan tahapan penulisan dalam kajian sejarah (Sjamsuddin, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etnis Tionghoa di Indonesia Dari Indonesia Merdeka Sampai Masa Kepemimpinan Soekarno

1945, setelah Indonesia merdeka dan lepas dari belenggu penjajahan Jepang serta aturan yang mengekang dibentuknya partai politik, maka kemudian muncul beragam partai politik di Indonesia. Salah satunya yakni lahir kembali

berbagai golongan Tionghoa dengan orientasi yang mereka perjuangkan, baik berorientasi ke Tionghoa maupun ke Hindia Belanda. Apalagi setelah konflik Indonesia-Belanda mencuat, berbagai partai politik mulai terbuka untuk mengajak bergabungnya etnis Tionghoa di dalam setiap partai yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh dukungan dari etnis Tionghoa dalam rangka mencapai tujuan para nasionalis.

Golongan Tionghoa yang condong ke Indonesia mulai terlihat kontribusinya, misalnya Persatuan Tionghoa pada tahun 1948 yang kemudian menjadi Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI, 1950-1954) serta organisasi-organisasi yang berorientasi ke Indonesia lainnya seperti badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI).

Menginjak tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia kemudian menata ekonomi bangsa Indonesia. Pengusaha-pengusaha pribumi mulai di pacu agar semakin berkembang dan tidak kalah bersaing dengan para etnis Tionghoa yang menggeluti bidang ini. Demi memperkuat pengusaha pribumi maka pemerintah melahirkan beragam kebijakan yang terlihat jelas memihak para pribumi. Kebijakan ini salah satunya dituangkan dalam "Program Benteng" yang digagas oleh Mr. Assaat dalam kongres importir Nasional seluruh Indonesia di Surabaya 19-23 Maret 1956. Isi dari proposal ini antara lain (Darini, 2011):

Pembinaan perusahaan milik pengusaha Pribumi dengan cara memberikan fasilitas kredit bank dan lisensi import-eksport secara khusus.

Menutup komoditi-komoditi dan pasar-pasar domestik tertentu dari penetrasi pengusaha asing dan keturunan asing, dan sebaliknya

menyediakan pasar tersebut bagi pengusaha pribumi.

Lahirnya kebijakan ini tidak serta merta membuat para pengusaha pribumi mencapai kesuksesan, dan mampu bersaing melawan pengusaha Tionghoa yang telah lama menggeluti bidang ini. Karena dirasa kurang efektif, maka lahir beberapa kebijakan lain, seperti peraturan pemerintah No.10 Tahun 1959 yang berisi larangan semua usaha dagang kecil milik orang asing pada tingkat desa mulai sejak 31 Desember 1959 (Darini, 2011).

Di sisi lain faktor kebencian Soekarno terhadap unsur kolonialis dan segala sekutunya serta kedekatannya dengan Partai Komunis yang berorientasi pada RRC dan Uni Soviet tanpa disadari memperluas ruang gerak PKI (Partai Komunis Indonesia) kepada etnis Tionghoa di berbagai sektor pemerintahan dalam negeri. Walau terlihat baik, namun hal ini justru menjadi boomerang bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Terbukti setelah kudeta terhadap pemerintahan Soekarno yang dimotori oleh PKI gagal pada 30 September, mengakibatkan segala unsur yang berkaitan dan terlibat dengan PKI harus dimusnahkan. Etnis Tionghoa yang pada saat itu dianggap dekat dengan PKI turut di salahkan atas peristiwa tersebut, sehingga semakin mengobarkan perselisihan dan memperkuat rasa benci pribumi terhadap etnis Tionghoa (Sulistyo, 2000).

Berdasarkan pemaparan tersebut, perjalanan etnis Tionghoa di Indonesia mengalami banyak tantangan, selain karena dianggap sebagai bangsa asing, etnis Tionghoa juga sering dikambinghitamkan dalam berbagai permasalahan yang timbul, misalnya ketika di masa kolonial dianggap sebagai antek-antek

Belanda, dan ketika terjadinya pemberontakan oleh PKI dianggap memainkan peran terhadap lahirnya pembenrontakan tersebut. Akan tetapi dibalik itu semua, bangsa Tionghoa turut memberikan sumbangsih besar dalam proses meraih kemerdekaan bangsa Indonesia dan memperjuangkan hak nya untuk menjadi warga negara Indonesia secara penuh, misalnya dengan melalui BAPERKI.

Orang Tionghoa di Indonesia Hingga Tahun 1965

Jatuhnya Soekarno dari tampuk pemerintahan bangsa Indonesia dengan semangat anti kolonialisnya oleh kudeta yang dilancarkan Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965 memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satunya yakni semakin memperburuk hubungan antara etnis Tionghoa dengan pribumi. Peranakan Tionghoa dituduh sebagai pelaku dan harus mempertanggung-jawabkan apa yang telah mereka lakukan. Dalam ranah perpolitikan dunia, kudeta ini mengakibatkan rusaknya hubungan bilateral antara Cina dengan Indonesia.

Dengan adanya stigma negatif terhadap etnis Tionghoa membuat pemerintah pada masa itu melarang kegiatan organisasi-organisasi yang memiliki anggota mayoritas etnis Tionghoa seperti BAPERKI. Karena organisasi ini terlihat begitu eksklusif dan hanya ditujukan kepada etnis Tionghoa semata, sekalipun ada rakyat pribumi yang bergabung, mereka hanya sebatas minoritas. Pemerintah mengkhawatirkan bahwa organisasi ini akan memicu terjadinya kudeta yang dipimpin oleh para etnis Tionghoa karena

merasa menjadi minoritas dan tidak diperlakukan secara adil. Oleh sebab itu ketika pelarangan dilakukan, pemerintah memberikan izin kepada etnis Tionghoa untk masuk dan bergabung dengan partai atau organisasi yang dipimpin oleh pribumi seperti golkar dan lainnya, dengan tujuan mengaburkan unsur diskriminatif (Suryadinata & Subono, 2005).

Dengan demikian, setelah jatuhnya Soekarno dari kursi kepresidenan, etnis Tionghoa mengalami diskriminasi ras yang semakin parah. Pemerintah juga berasumsi bahwa BAPERKI yang merupakan organisasi persatuan etnis Tionghoa dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia dan memicu lahirnya pemberontakan dari kalangan etnis Tionghoa. Demi mencegah hal tersebut maka organisasi ini dibubarkan, namun pemerintah memberikan akses bagi etnis Tionghoa untuk terjun dala dunia perpolitikan.

Lahirnya BAPERKI sebagai Organisasi Tionghoa Peranakan di Indonesia

Peristiwa sejarah diaspora orang-orang Tionghoa ke Indonesia berproses hingga adanya kebijakan asimilasi menyebabkan terbentuknya identitas budaya masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan istilah representatif. Dalam Hall (2020) dipaparkan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang jelas dan tanpa masalah. Identitas sebagai sebuah "produksi" yang tidak pernah selesai, selalu dalam proses, dan selalu berada di dalam, bukan di luar, representasi. Pandangan ini mempersoalkan otoritas dan keaslian di mana istilah "identitas kultural" meletakkan klaimnya. Berikut ini akan dipaparkan sejarah diaspora

masyarakat Tionghoa yang berproses hingga masyarakat Tionghoa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

Ketika usulan Rancangan Undang-undang Kewarganegaraan baru yang berdasarkan sistem aktif pada tahun 1954 bergulir melalui kabinet Ali Sastroamidjojo (Setiono, 2002), golongan minoritas Tionghoa yang ada di Indonesia terutama golongan Tionghoa peranakan menanggapi hal tersebut sebagai masalah yang harus segera ditemukan jalan keluarnya. Sebelumnya yang menjadi pedoman dalam menentukan kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1946 dan juga hasil pembicaraan mengenai masalah kewarganegaraan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang berdasarkan sistem pasif. Menurut beberapa sumber referensi, Tjhan dalam Ayuningtyas, (2007), tujuan dari adanya usulan dikeluarkannya RUU Kewarganegaraan baru yang berdasarkan pada sistem aktif adalah agar golongan Tionghoayang ada di Indonesia sebanyak mungkin menjadi warga negara asing (Ayuningtyas, 2007: 43). Hal tersebut tentu saja mengacu pada dominasi ekonomi yang dipegang oleh golongan Tionghoayang ada di Indonesia. Tanggal 27 Desember 1951 merupakan batas akhir bagi mereka untuk menentukan pilihannya menjadi WNI atau tetap berkewarganegaraan Cina. Namun ketika mereka telah memilih menjadi WNI, muncul usulan rancangan undang-undang yang mempertanyakan kembali status hukum kewarganegaraan mereka. Rancangan UU Kewarganegaraan yang berdasarkan sistem aktif tentu saja menimbulkan protes keras dari golongan Tionghoadi Indonesia.

Sementara itu Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI) sebagai organisasi golongan Tionghoayang ada di Indonesia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Bahkan dalam suatu rapat pimpinan PDTI, para pimpinannya menyatakan bahwa organisasinya sudah tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingan golongan Tionghoadi Indonesia. Mereka kemudian memutuskan untuk membentuk suatu organisasi yang akan dilindungi oleh golongan Tionghoayang ada di Indonesia. Kemudian para pimpinan PDTI mengadakan rapat pada bulan Februari tahun 1954. Ketika rapat, Thio Thiam Tjong sebagai pemimpin PDTI menunjuk Oei Tjoe Tat untuk mengkoordinasikan rapat selanjutnya yang diagendakan untuk membentuk organisasi baru yang merupakan organisasi massa (Ayuningtyas, 2007). Ide awal yang mereka miliki yaitu membentuk organisasi massa bukan sebuah partai politik. Menurut mereka dengan dibentuknya organisasi massa tersebut memungkinkan massa dari berbagai aliran politik di Indonesia untuk ikut bergabung dan aktif di dalamnya. Nama yang mereka usulkan bagi organisasi baru itu adalah Baperwatt (Badan Permusyawaratan Warga Negara Turunan Tionghoa).

Istilah permusyawaratan digunakan, karena sikap demokratis tersirat dalam istilah tersebut (Ayuningtyas, 2007 :45). Lebih lanjut, rapat juga membahas tentang sosok yang akan menjadi pemimpin Baperwatt. Menurut mereka, kriteria pemimpin Baperwatt adalah seseorang yang telah memiliki nama dalam memperjuangkan kepentingan golongan Tionghoadi Indonesia. Tjhan dalam Ayuningtyas (2007), semua yang hadir pada saat itu setuju memilih Siauw Giok Tjhan sebagai calon ketua Baperwatt yang

memiliki pandangan politik yang pada saat itu dianggap radikal, seperti Siauw Giok Tjhan, Go Gien Tjwan dan Ang Jang Goan. Selain kedua golongan yang telah disebutkan di atas terdapat golongan ketiga yang bergaris netral, artinya memiliki komitmen besar untuk tidak mendukung ideology politik tertentu. Diantaranya adalah Thio Thiam Tjong, Oei Tjoe Tat, Yap Thiam hien, Tan Eng Tie, Lim Tjong Hian, Liem Koen Seng (Ayuningtyas, 2007).

Pada rapat pembentukan tersebut mereka membahas mengenai nama organisasi baru yang diusulkan oleh para pemimpin PDTI, yaitu Baperwatt. Nama Baperwatt selain mendapat dukungan dari pemimpin PDTI, juga didukung oleh Yap Thiam Hien. Menurut pendapat mereka kata *Tionghoa* harus dimasukkan sebagai kepanjangan dari nama organisasi tersebut dengan maksud untuk mempertegas golongan mana yang mereka bela. Ujian dari organisasi ini harus berhubungan dengan masalah kewarganegaraan. Tjhan dalam Ayuningtyas, (2007) menyatakan bahwa maksud Siauw Giok Tjhan dalam hal ini adalah bahwa hubungan *nation building* tidak dapat dipisahkan dari usaha dalam mencapai persamaan diantara sesama warga negara.

Tjhan dalam Ayuningtyas, (2007), selanjutnya Siauw Giok Tjhan mengusulkan agar nama organisasi tersebut yang menggunakan kata *Tionghoa* sebagai kepanjangan dalam nama organisasi lebih baik dihapus. Ia menganjurkan agar nama Baperwatt diganti dengan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan. Usulan yang diajukan oleh Siauw Giok Tjhan mengenai perubahan nama organisasi yang akan dibentuk selanjutnya mendapat dukungan dari para

partisipasi rapat. Maka kemudian nama Baperwatt diubah menjadi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) dan dipakai sebagai nama organisasi baru yang telah terbentuk. Dalam rapat pembentukan BAPERKI pada tanggal 13 Maret 1954, dihasilkan azas BAPERKI berkaitan dengan keadilan pada tiap warga negara yang memiliki perbedaan berdasarkan keturunan harus terjamin hak-hak dan kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaannya (BAPERKI, n.d.). Terpilihlah Siauw Giok Tjhan secara bulat sebagai ketum dari BAPERKI. Susunan pengurus yang terpilih dalam rapat tanggal 13 Maret 1954, antara lain (BAPERKI, n.d.):

Ketua : Siauw Giok Tjhan (Jakarta)
 Wakil Ketua : Mr. Oei Tjoe Tat, Khoe Woen Sioe, Thio Thiam Tjong (Jakarta), The Pek Siong (Surabaya).
 Penulis : Drs. Go Gien Jhwan (Jakarta)
 Bendahara : Ang Jan Goan (Jakarta)
 Komisaris : Mr. Liem Tjong Hian (Palembang), Tan Tjin Kong (Banjarmasin), Tan Siang Lian (Semarang), Ir. Tan Hwat Tiang (Bandung).

Maka dari itu perjuangan BAPERKI sebagai organisasi berhubungan erat dengan *nation building* dan masyarakat Indonesia yang bersih dari rasialisme. Selain itu, BAPERKI akan memperjuangkan adanya Undang-undang Kewarganegaraan yang memungkinkan sebanyak mungkin orang-orang keturunan asing khususnya golongan *Tionghoa* di Indonesia untuk menjadi WNI. Di samping itu BAPERKI juga menginginkan dikeluarkannya UU yang

menjamin semua usaha untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk kesejahteraan warganya. Tjhan dalam Ayuningtyas, (2007) menyatakan bahwa BAPERKI akan berfungsi sebagai wakil dari golongan minoritas dan perwakilannya yang ada dalam parlemen dan konstituante akan bebas dari pengaruh partai-partai politik.

Peran BAPERKI dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Universitas Trisakti yang dikenal saat ini pada awal berdirinya diberi nama dengan Universitas BAPERKI yang didirikan oleh para petinggi organisasi BAPERKI pada tahun 1958. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 1962 nama tersebut berubah kembali menjadi Universitas Res Publica, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat pada waktu itu dengan nama URECA. Nama Universitas Res Publica diambil dari potongan pidato yang disampaikan oleh bapak proklamator Indonesia, Soekarno dalam salah satu pidatonya. Secara bahasa, Res Publica memiliki makna "Untuk Kepentingan Umum", sehingga dapat dimaknai bahwa Universitas Res Publica memiliki tujuan sebagai wadah pendidikan yang didirikan untuk mewakili kepentingan masyarakat umum. Akan tetapi berselang beberapa tahun setelah pergantian nama, terjadilah salah satu peristiwa menggemparkan dalam sejarah Indonesia yakni peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Peristiwa ini pula yang memicu pembubaran BAPERKI oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1966. URECA yang berada di bawah BAPERKI pun turut di akuisisi oleh pemerintah setelah kejadian tersebut. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa URECA merupakan bagian erat dari BAPERKI

dan dianggap oleh pemerintah sebagai salah satu wadah yang akan memicu lahirnya golongan komunis baru dengan sifat anti pancasila, sehingga mengancam kesejahteraan rakyat serta kedaulatan berbangsa dan bernegara (Davgaf, 2022).

Jatuhnya Soekarno, timbulnya isu-isu miring seputar BAPERKI dan URECA membuat masyarakat yang telah mendaftarkan anaknya sebagai mahasiswa di Universitas ini kemudian enggan melakukan daftar ulang dan sebagian ada yang berpindah kuliah. Selain isu tersebut, alasan lain para mahasiswa menolak registrasi ulang karena mereka sudah terdaftar sebagai pengurus dari organisasi CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) yang mempunyai kecenderungan beraliran kiri (oposisi pemerintah) atau sekadar khawatir akan stigmatisasi kiri beserta paham komunisnya. Pada titik inilah kemudian lahir Universitas Trisakti sebagai bukti nyata dibubarkannya Universitas Res Publica yang diprakarsai oleh Siauw giok Tjhan sang ketua BAPERKI, pada masa Orde Baru (Wikipedia, 2021).

Proses akuisisi Universitas Res Publica di tangan pemerintah Orde Baru membuat Universitas ini lahir dengan bentuk dan wujud yang baru pula dan namanya pun berganti menjadi Universitas Trisakti. Dengan segera para pengurus dan anggota dewan dipilih ulang oleh pemerintah Orde Baru agar jauh dari unsur BAPERKI serta etnis Tionghoa. Berbeda dengan struktur organisasi sebelumnya yang condong dipimpin satu presidium saja, di masa ini Universitas Trisakti dipimpin oleh tiga presidium sesuai kesepakatan rapat, yang terdiri dari tiga unsur, yakni unsur ABRI, Departemen

PTIP, serta unsur Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB).

Lembaga pendidikan yang dibangun oleh BAPERKI ini diprakarsai atas ide Siauw Giok Tjhan seorang aktivis politik dan wartawan yang juga menjabat sebagai ketua BAPERKI. Ia melihat keterbatasan pada kaum pribumi dan keturunan Tionghoa dalam mengenyam pendidikan tingkat tinggi. Oleh sebab itu Universitas ini pada awalnya dibangun dengan tujuan untuk menjadi salah satu sarana yang memfasilitasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan di jenjang perkuliahan dari berbagai kalangan masyarakat baik rakyat kelas bawah ataupun warga keturunan etnis Tionghoa. Proses pembangunan awal pun diprakarsai dengan cara mengumpulkan dana melalui penggalangan kepada masyarakat pribumi dan keturunan Tionghoa, akan tetapi karena kejatuhan Soekarno dan tuduhan miring seputar BAPERKI, maka Universitas ini di ambil alih oleh pemerintah pada masa Orde Baru dan diganti secara total baik nama maupun struktur keorganisasian. (Davgaf, 2022).

KESIMPULAN

Adanya diskriminasi ras terhadap etnis Tionghoa diakibatkan berbagai tuduhan-tuduhan tanpa dasar sejak zaman kolonial Belanda sampai dengan masa kemerdekaan Indonesia, mengakibatkan sebagian besar etnis Tionghoa merasa bahwa mereka hanya minoritas di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Lantas demi mempertahankan eksistensinya tersebut dari berbagai kebijakan yang memberatkan golongannya, maka lahirkan BAPERKI.

BAPERKI hadir sebagai organisasi yang bertujuan untuk menegakan keadilan bagi setiap etnis Tionghoa. Misalnya setelah turunnya Soekarno sebagai Presiden akibat gerakan G30S/PKI banyak rakyat Tionghoa yang dikambinghitamkan dan dituduh terlibat di dalamnya. Pada saat itu BAPERKI mencoba memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa mereka tidak terlibat akan hal tersebut. Selain masalah tersebut. Permasalahan lainnya yang menyulut lahirnya BAPERKI yakni terkait status dwikewarganegaraan yang mereka miliki. Demi mengentaskan masalah-masalah tersebut, maka BAPERKI hadir. Tidak hanya sebatas menyelesaikan saja, harapan sesungguhnya BAPERKI yakni mewujudkan diterimanya etnis Tionghoa oleh golongan pribumi dan tidak adanya aturan yang memberatkan etnis mereka seperti politik Benteng. Karena pada dasarnya warga negara Indonesia dalam pandangan mereka adalah orang yang diakui oleh undang-undang, bukannya orang yang ditindas oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, A. (2007). *Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) organisasi sosial politik Cina peranakan di Indonesia tahun 1954-1966* (Universitas Indonesia). Universitas Indonesia. Retrieved from <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20159873>
- BAPERKI. Berita BAPERKI. 26 April 1954. (n.d.). p. 1.
- Darini, R. (2011). Kebijakan Negara dan Sentiment Anti-Cina: Perspektif Historis. *Mozaik*, 2, 1–12. Retrieved from http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Ririn_Darini,SS.,M.Hum./kebijk_neg_thd_etnis_tiong-ISTORIA.pdf
- Davgaf. (2022). Universitas Trisakti. Retrieved December 18, 2021, from Wikipedia website: https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Triska

- kti#Universitas_BAPERKI
- Noordjanah, A. (2010). *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Ombak.
- Setiono, B. G. (2002). *Tionghoa Indonesia dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.
- Sjamsuddin, H. (2016). *Metodologi Sejarah* (Cetakan 3; M. Nursam, Ed.). Yogyakarta: Ombak.
- Suhandinata, J. (2009). *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistyo, H. (2000). *Palu Arit di Ladang Tebu Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)* (Cetakan 8). Jakarta: KPG (Keputusan Populer Gramedia).
- Suryadinata, L., & Subono, N. I. (2005). *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002* (Cetakan 1). Jakarta: LP3ES.
- Wikipedia. (2021). Kota Bima. Retrieved from Wikipedia website: https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Bima&action=history